

TESIS

STRATEGI *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI BALI BERBASIS NILAI *TRI HITA KARANA*

Disusun Oleh:

NAMA : IMAMUJAHID IMANULLAH AL AMIN
NPM : 2242021051
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.AP)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2026**

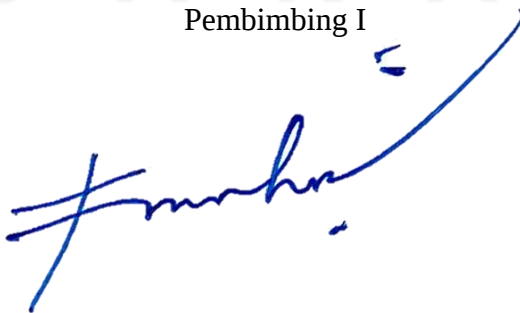
**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Imamujahid Imanullah Al Amin
NPM : 2242021051
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Pembangunan Daerah
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Strategi *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Sampah Di Provinsi Bali Berbasis Nilai *Tri Hita Karana*
Judul Tesis (Bahasa Inggris) : *Collaborative Governance Strategies for Waste Management in Bali Province Based on Tri Hita Karana*

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis

Pembimbing I



Dr. Firman Hadi Rivai, S.STP., MPA.

Pembimbing II



Dr. Bambang Giyanto, SH., M.Pd.

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Imamujahid Imanullah Al Amin
NPM : 2242021051
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Pembangunan Daerah
Judul Tesis : Strategi *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Sampah Di Provinsi Bali Berbasis Nilai *Tri Hita Karana*

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister Terapan
Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta,
Lembaga Administrasi Negara, pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 24 Juni 2026
Pukul : 14.30 – 16.00 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS:

Ketua Sidang : Dr. Mala Sondang Silitonga, M.Li

Sekretaris : Dr. Ridwan Rajab, M.Si

Anggota : Dr. Alih Aji Nugroho, MPA

Dr. Firman Hadi Rivai, S.STP., MPA. :

Dr. Bambang Giyanto, SH., M.Pd. :



Handwritten signatures of the examiners in blue ink, corresponding to the names listed on the left.

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Imamujahid Imanullah Al Amin
NPM : 2242021051
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Pembangunan Daerah

Bersama ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya buat berjudul **“Strategi Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Provinsi Bali Berbasis Nilai Tri Hita Karana”** adalah benar keasliannya dan merupakan hasil karya saya sendiri serta bukan hasil dari penelitian yang telah diajukan guna memperoleh suatu gelar akademik pada universitas ataupun lembaga yang sederajat. Bilamana pada kemudian hari penelitian tesis ini adalah hasil penjiplakan maupun plagiat atas hasil karya orang lain, maka saya bersedia untuk bertanggung jawab serta menerima sanksi menurut peraturan serta ketentuan yang berlaku pada Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24 Juni 2026



Imamujahid Imanullah Al Amin

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis yang berjudul “Strategi *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Sampah di Provinsi Bali Berbasis Nilai *Tri Hita Karana*”. Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.AP) pada Program Magister Terapan, Politeknik STIA LAN Jakarta.

Pada kesempatan ini, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu dalam proses penelitian tesis ini, yaitu: 1) Bapak Dr. Firman Hadi Rivai, S.STP., MPA. dan 2) Bapak Dr. Bambang Giyanto SH, M.Pd. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan berbagai arahan, koreksi, saran, dan masukan dalam penelitian tesis ini, serta memberikan dorongan semangat dan selalu mengingatkan untuk tetap mengerjakan dan menyelesaikan tesis. Pada kesempatan baik ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada;

1. Ayahanda Gunawan Widyassana dan Ibunda Dwi Arikhandayani atas doa dan dukungannya yang tiada pernah berhenti kepada peneliti;
2. Keluargaku tercinta, istriku Alfina Nur, anak-anakku Reihan Abdurrahman, dan Hilyah Syifa Al Faza yang selalu mendoakan, serta menjadi motivasi, dan penyemangat dalam penyusunan tesis ini;
3. Seluruh Dosen Pengajar pada Magister Manajemen Pembangunan Daerah yang berkenan memberikan ilmunya kepada saya selama menempuh perkuliahan dan Mbak Seha yang membantu urusan administrasi dalam kelancaran selama masa perkuliahan;
4. Para Narasumber yang luar biasa Asisten I Setda Provinsi Bali, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bali, Prof. Dr. Ir. Ni Luh Kartini, M.S., Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Kepala UPT TPA Suwung, Bendesa Adat Sumerta, dan rekan-rekan Deltera yang telah bersedia

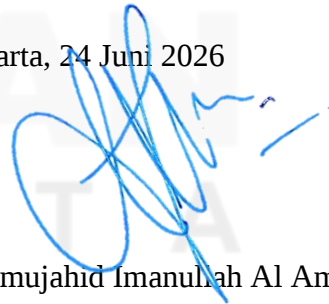
meluangkan waktunya untuk membantu memberikan berbagai informasi kepada peneliti dalam penelitian ini;

5. Rekan-rekan sekelas MPD 2022 (Pak Ketua Kang Bustomi, Mba Reny, Mba Aini, Mba Riya, (alm.) Mba Linda, Mas Reza, Kang Endang, & Kang lian) yang selalu mendukung untuk menyelesaikan Tesis, MPD 20222 adalah kelas privat yang berkesan. Tak luput juga ucapan terima kasih kepada Mba Seha yang sangat luar biasa membantu kesulitan rekan-rekan mahasiswa.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, peneliti sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan, bantuan, dan dukungan yang telah diberikan oleh semua pihak dengan pahala yang berlipat ganda. Peneliti berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang administrasi publik, serta menjadi referensi bagi penelitian dan kajian selanjutnya.

Jakarta, 24 Juni 2026



Imamujahid Imanullah Al Amin

STRATEGI *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI BALI BERBASIS NILAI *TRI HITA KARANA*

Imamujahid Imanullah Al Amin, Firman Hadi Rivai, Bambang Giyanto

imamujahidialamin@gmail.com

Politeknik STIA LAN Jakarta

ABSTRAK

Permasalahan sampah di Provinsi Bali semakin kompleks seiring meningkatnya jumlah penduduk, aktivitas pariwisata, dan keterbatasan kapasitas pengelolaan sampah. Tingginya timbulan sampah, kondisi TPA yang telah melebihi kapasitas, keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, serta belum terintegrasinya kebijakan antar pemangku kepentingan menjadi tantangan utama dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Pendekatan *Collaborative Governance* dinilai mampu mengintegrasikan peran pemerintah, masyarakat, desa adat, sektor swasta, dan aktor lainnya dalam pengelolaan sampah berbasis sumber. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di Provinsi Bali serta merumuskan strategi penguatannya.

Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan karakteristik pelaksanaan *Collaborative Governance* Ansell dan Gash. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di Provinsi Bali telah berjalan cukup baik. Pemerintah Provinsi Bali berperan sebagai inisiator dan fasilitator kolaborasi yang didukung oleh pemerintah kabupaten/kota, desa adat, sektor swasta, komunitas lingkungan, akademisi, dan masyarakat. Keunikan model kolaborasi di Bali terletak pada peran desa adat sebagai *collaborative hub* yang menghubungkan sistem pemerintahan formal dengan sistem sosial budaya masyarakat. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa kesenjangan kapasitas antar aktor, belum optimalnya koordinasi lintas sektor, dan belum meratanya partisipasi masyarakat.

Penelitian ini merumuskan lima strategi penguatan *Collaborative Governance*, yaitu penguatan peran desa adat, penguatan kelembagaan kolaborasi lintas sektor, pengembangan kemitraan sektor swasta berbasis ekonomi sirkular, penguatan pendidikan dan inovasi pengelolaan sampah, serta penguatan sistem pembinaan dan pengawasan kolaboratif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa institusi sosial budaya lokal merupakan faktor kunci keberhasilan kolaborasi dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang partisipatif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Pengelolaan Sampah, Desa Adat.

COLLABORATIVE GOVERNANCE STRATEGIES FOR WASTE MANAGEMENT IN BALI PROVINCE BASED ON TRI HITA KARANA

Imamujahid Imanullah Al Amin, Firman Hadi Rivai, Bambang Giyanto

imamujahidialamin@gmail.com

Politeknik STIA LAN Jakarta

ABSTRACT

Waste management in Bali Province has become increasingly complex due to population growth, expanding tourism activities, and limited waste management capacity. The increasing volume of waste generation, overcapacity of landfill sites, inadequate waste management infrastructure and facilities, and the lack of policy integration among stakeholders have become major challenges in achieving sustainable waste management. The Collaborative Governance approach is considered capable of integrating the roles of government, communities, traditional villages, the private sector, and other stakeholders in source-based waste management. This study aims to analyze the implementation of Collaborative Governance in waste management in Bali Province and to formulate strategies for its enhancement.

This study employed a descriptive qualitative method. Data were collected through interviews, observations, and document analysis. The analysis was conducted using the Collaborative Governance framework developed by Ansell and Gash. The findings indicate that the implementation of Collaborative Governance in waste management in Bali Province has been relatively effective. The Provincial Government of Bali serves as the initiator and facilitator of collaboration, supported by district and municipal governments, traditional villages, private sector actors, environmental communities, academics, and local communities. A distinctive feature of Bali's collaborative model is the role of traditional villages as collaborative hubs that connect the formal governmental system with the socio-cultural system of the community. Nevertheless, several challenges remain, including disparities in stakeholders' capacities, suboptimal cross-sectoral coordination, and uneven levels of community participation.

This study proposes five strategies to strengthen Collaborative Governance: strengthening the role of traditional villages, enhancing cross-sector collaborative institutions, developing circular economy-based partnerships with the private sector, strengthening education and innovation in waste management, and improving collaborative monitoring and supervision systems. The findings demonstrate that local socio-cultural institutions constitute a key factor in the success of collaborative efforts toward participatory and sustainable waste management.

Keywords: Collaborative Governance, Waste Management, Traditional Villages.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis.....	29
1. Tinjauan Kebijakan:.....	29
2. Tinjauan Teoritis.....	36
3. Kerangka Berpikir.....	51
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	53
A. Metode Penelitian	53
B. Teknik Pengumpulan Data.....	54
1. Sumber Data Primer.....	54
2. Sumber Data Sekunder	57

C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	58
D. Instrumen Penelitian	59
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	60
A. Gambaran Umum Lokus Penelitian.....	60
B. Hasil dan Pembahasan	65
1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah di Provinsi Bali	68
1.1 Kondisi Awal Kolaborasi (<i>Starting Conditions</i>).....	69
1.2 Desain Kelembagaan	87
1.3 Kepemimpinan Fasilitatif (<i>Facilitative Leadership</i>)	95
1.4 Proses Kolaboratif (<i>Collaborative Process</i>)	103
2. Strategi Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah di Provinsi Bali.....	116
2.1 Penguatan Forum Kolaborasi Lintas Sektor yang Permanen, Inklusif, dan Berbasis Rencana Aksi Bersama	117
2.2 Penguatan Desa Adat sebagai <i>Collaborative Hub</i> Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber	119
2.3 Penguatan Kapasitas Kelembagaan, Sarana Prasarana, dan Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.....	120
2.4 Penguatan Kemitraan Sektor Swasta, Pelaku Pariwisata, dan Ekonomi Sirkular.....	122
2.5 Penguatan Edukasi, Komunikasi Publik, dan Perubahan Perilaku Berbasis Budaya Lokal	123
2.6 Penguatan Sistem Data, Monitoring, Evaluasi, dan Akuntabilitas Kolaboratif	125

2.7 Replikasi Praktik Baik dan Pengembangan Model Kolaborasi Berbasis Wilayah.....	126
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	130
A. Kesimpulan	130
1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan <i>Collaborative Governance</i> dalam Pengelolaan Sampah di Provinsi Bali Berdasarkan Prinsip Nilai <i>Tri Hita Karana</i>	130
2. Strategi Penguatan <i>Collaborative Governance</i> dalam Pengelolaan Sampah di Provinsi Bali Berdasarkan Prinsip Nilai <i>Tri Hita Karana</i> ..	133
B. Saran	134
1. Saran Praktis	135
2. Saran Akademis	138
C. Kontribusi Penelitian	138

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN PENELITIAN

PEDOMAN WAWANCARA

LEMBAR HASIL WAWANCARA

DOKUMENTASI PENELITIAN

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Timbulan Sampah Harian di Provinsi Bali Tahun 2020-2025	2
Tabel I. 2	Jumlah TPST dan TPS3R di Provinsi Bali	4
Tabel II. 1	Matriks Sandingan Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel III. 1	Daftar Sumber Informan Penelitian.....	55
Tabel IV. 1	Jumlah penduduk Provinsi Bali Tahun 2024-2026.....	61
Tabel IV. 2	Desa/Kelurahan yang Telah Melakukan Upaya Menuntaskan Sampah.....	112
Tabel IV. 3	Sintesis Proses Collaborative Governance	114
Tabel IV. 4	Matriks Strategi Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Provinsi Bali.....	127

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1	Skema Colaborative Governance	14
Gambar II. 2	Hirarki Sampah Menurut UNEP Waste Climate and Change.....	16
Gambar II. 3	Kerangka Pengelolaan Sampah Berkelanjutan dan Terintegrasi...	17
Gambar II. 4	Model Collaborative governance Anshel dan Gash	47
Gambar II. 5	Tahap Penilaian Collaborative governance	48
Gambar II. 6	Framework Konsep Triple-Helix, Quarouple-Helix, dan Penta-Helix	49
Gambar II. 7	Kerangka Penelitian Strategi Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah di Provinsi Bali Berbasis Nilai Tri Hita Karana.....	52
Gambar III. 1	Skema Pengolahan dan Analisis Data	59
Gambar IV. 1	Filosofi Tri Hita Karana	63
Gambar IV. 2	Model collaborative governance Anshell dan Gash.....	69
Gambar IV. 3	Model Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah di Provinsi Bali Berbasis Tri Hita Karana	116

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Bali sebagai salah satu destinasi wisata internasional, memainkan peran penting dalam sektor pariwisata Indonesia. Keindahan alam Bali, budaya yang kaya, serta keramahan penduduk lokal menjadi daya tarik utama bagi jutaan wisatawan domestik dan mancanegara setiap tahunnya. Perkembangan pariwisata Bali cenderung terpusat pada Kawasan perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Sarbagita), wilayah ini merupakan pusat ekonomi, budaya, dan daya tarik wisata alam yang luar biasa. Terkonsentrasikannya pariwisata Bali pada Kawasan Sarbagita ini juga menghadirkan berbagai tantangan, seperti masalah kemacetan dari dan ke destinasi wisata, peningkatan kebutuhan infrastruktur, serta permasalahan lingkungan, termasuk permasalahan sampah yang perlu menjadi perhatian serius untuk diselesaikan agar tidak menjadi ancaman nyata bagi kelestarian alam Bali dan keberlangsungan pariwisata Bali.

Permasalahan sampah menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat, tidak hanya di Bali, melainkan regional, ataupun nasional. Bahkan masalah sampah di Bali kerap kali menjadi sorotan media internasional. Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk, kemajuan teknologi, dan gaya hidup tentunya berdampak terhadap meningkatnya jumlah timbulan sampah. Permasalahan sampah tidak hanya berkaitan dengan jumlah timbulan sampah yang terus bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk, terbatasnya lahan sebagai tempat pembuangan akhir (TPA) juga tidak mampu menampung timbulan sampah yang ditimbun ke TPA (*landfill*) secara berkelanjutan tanpa adanya upaya penanganan ataupun pengurangan sampah. Tidak terkelolanya sampah dengan baik akan berdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan, seperti pencemaran tanah akibat kurang bijak dalam mengelola sampah plastik ataupun tidak tepatnya dalam pengelolaan air limbah berbahaya, yang secara berkesinambungan apabila sampah tidak terkelola dengan benar juga akan berakhir di perairan dan mencemari kualitas

serta ekosistem air, baik air sungai maupun di laut. Selain itu, dampak negatif lainnya berpengaruh terhadap aspek sosial dan ekonomi, khususnya pariwisata Bali. Citra Pulau Bali sebagai surga wisata menjadi negatif di mata wisatawan asing akibat menumpuknya sampah, terutama sampah plastik, di berbagai lokasi wisata dan pantai.

Laporan dari berbagai media internasional mengenai sampah yang mencemari pantai-pantai terkenal Bali seperti Kuta dan Sanur, menjadi sorotan negatif bagi wisatawan, Budiman (2022) “seorang turis Amerika yang berkunjung di Bali mengungkapkan popularitas Bali sebagai tujuan wisata bisa anjlok bila masalah sampah tidak tertangani dengan baik, terutama sampah plastik yang tidak mudah terdekomposisi dan merusak lingkungan”. Selain itu di dalam artikel yang sama, juga menyebutkan sejumlah media besar seperti *The Guardian*, *CNN*, dan *National Geographic* sering menyorot keluhan dari turis-turis asing terkait masalah sampah di Bali, hingga ada ungkapan dari para wisatawan yang menyebut Bali sebagai “*the Island of Trash*”. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, tidak hanya akan berdampak pada lingkungan tetapi juga berpengaruh terhadap eksistensi Bali sebagai destinasi wisata unggulan.

Permasalahan saat ini, jumlah timbulan sampah atau jumlah produksi sampah harian di Bali terus meningkat tidak hanya disebabkan dari aktivitas sehari-hari rumah tangga, melainkan juga disebabkan tumbuhnya aktivitas pariwisata di Bali yang turut menyumbang tingginya timbulan sampah. Berdasarkan data yang dikutip dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), rata-rata jumlah timbulan sampah harian di Provinsi Bali terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 s.d 2025, berikut data timbulan sampah harian di Provinsi Bali Tahun 2020-2025:

Tabel I. 1
Timbulan Sampah Harian di Provinsi Bali Tahun 2020-2025

Kab./Kota	Timbulan Sampah Harian (ton/hari)					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kab. Jembrana	164,70	162,73	162,94	163,74	164,28	165,44

Kab./Kota	Timbulan Sampah Harian (ton/hari)					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kab. Tabanan	230,82	230,82	N/A	232,67	N/A	N/A
Kab. Badung	281,24	319,81	327,33	534,86	547,43	451,7
Kab. Gianyar	438,86	387,23	538,90	538,90	562,02	561
Kab. Klungkung	N/A	N/A	103,13	110,25	111,38	114,47
Kab. Bangli	108,98	110,90	111,88	112,86	113,86	114,2
Kab. Karangasem	248,50	N/A	311,54	281,22	281,22	291,8
Kab. Buleleng	341,90	339,10	392,56	412,50	413,37	413,1
Kota Denpasar	663,26	957,59	866,61	980,78	1.004,9	N/A
Jumlah	2.479,24	2.508,17	2.814,89	3.367,77	3.198,5	2.111,71.

Sumber: data diolah dari SIPSN, 2026.

Melihat data timbulan sampah harian pada data tersebut di atas, sampah harian di Kota Denpasar menjadi daerah dengan rata-rata timbulan sampah harian terbanyak dan mengalami tren yang terus meningkat. Kawasan perkotaan Sarbagita menjadi penyumbang timbulan sampah harian tertinggi di Provinsi Bali, dengan rata-rata timbulan sampah harian pada tahun 2024 di Kota Denpasar mencapai 1.004,9 ton/hari, Kab. Gianyar mencapai 562,02 ton/hari, Kab. Badung mencapai 547,43 ton/hari, dan Kab. Tabanan mencapai 232,67 ton/hari. Selanjutnya, jika melihat dari komposisi berdasarkan sumber sampah di Bali pada tahun 2025, sampah rumah tangga menjadi sumber sampah yang mendominasi, yaitu mencapai 60,96% dari total timbulan sampah yang ada, kemudian disusul dengan sampah pasar (12,14%), sampah kawasan (7,22%) dan sampah lain-lain.

Permasalahannya, kondisi TPA Regional Suwung yang cakupan wilayahnya meliputi Kota Denpasar dan Kab. Badung saat ini telah over kapasitas, sebagaimana pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, “TPA Regional Suwung sudah melebihi kapasitas dan harus segera ditutup karena kondisinya sudah tidak layak. Terlebih TPA itu selama ini menjadi lokasi pembuangan sampah di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Hal ini juga mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat, kegiatan pariwisata, serta

menimbulkan kerusakan ekosistem di sekitarnya”. Bahkan pada saat musim kemarau TPA Suwung juga kerap kali mengalami kebakaran akibat tingginya kandungan gas metana pada tumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik. Salah satunya terjadi pada bulan Oktober 2023 TPA Regional Suwung mengalami kebakaran besar hingga Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kota Denpasar menetapkan status tanggap darurat bencana untuk mengatasi kebakaran TPA tersebut dan memerlukan waktu 14 hari sampai proses pendinginan selesai. Menurut Pj. Gubernur Bali, “Terbakarnya TPA Suwung dan sejumlah TPA di Bali harus jadi pembelajaran bagaimana dalam mengelola sampah agar tidak bergantung pada TPA sebagai pembuangan terakhir”, ke depan pengelolaan sampah di Bali diharapkan dapat tertangani dari sumber sampahnya, dan residu sampah dapat terkelola habis pada Tempat Pengelolaan Sampah 3 *Reduce, Reuse, dan Recycle* (TPS3R) dan/atau Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) sehingga di Bali ke depan tidak perlu ada lagi TPA.

Menjadi persoalan lainnya adalah ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur untuk mengelola sampah di sumber tidak tersedia secara merata seperti di rumah tangga dan komunitas, masih menjadi salah satu persoalan utama dalam pengelolaan sampah di Bali, hal ini sebagaimana data sebaran Fasilitas Pengolahan Sampah TPS3R dan TPST di Provinsi Bali.

Tabel I. 2
Jumlah TPST dan TPS3R di Provinsi Bali

NO	KAB/KOTA	JML DESA/ KEL	JML DESA ADAT	JUMLAH TAHUN 2024		STATUS			
				TPS3R	TPST	AKTIF BEROPERASI		TIDAK/ KURANG OPTIMAL	
						TPS3R	TPST	TPS3R	TPST
1	DENPASAR	43	35	26	3	26	1	-	2
2	BADUNG	62	122	33	2	30	-	3	2
3	GIANYAR	70	273	43	0	38	-	5	-
4	TABANAN	133	349	44	-	6	-	38	-
5	KLUNGKUNG	59	122	37	1	37	1	-	-
6	KARANGASEM	78	190	16	-	7	-	9	-

NO	KAB/KOTA	JML DESA/ KEL	JML DESA ADAT	JUMLAH TAHUN 2024		STATUS			
				TPS3R	TPST	AKTIF BEROPERASI		TIDAK/ KURANG OPTIMAL	
						TPS3R	TPST	TPS3R	TPST
7	BULELENG	148	170	53	-	30	-	23	-
8	JEMBRANA	51	64	13	1	12	1	1	-
9	BANGLI	72	168	11	-	9	-	2	-
TOTAL		716	1.493	276	7	195	3	81	4

Sumber: data diolah dari SIPSN, 2026.

Melihat data pada Tabel I.2 tersebut di atas, dari 716 jumlah desa dan kelurahan di Provinsi Bali, hanya tersedia 276 TPS3R dan 7 TPST, diantaranya 195 TPS3R dan 3 TPST berstatus aktif beroperasi. Kurangnya fasilitas pemilahan sampah yang terintegrasi seperti keterjangkauan dan ketersediaan TPS3R dan TPST menjadi kendala lain dalam pengelolaan sampah di Bali, padahal keberadaan sarana dan prasarana tersebut merupakan salah satu solusi efektif dalam mengurangi volume sampah plastik dan mendorong untuk dilakukannya daur ulang terhadap sampah plastik. Hal lain, keberadaan bank sampah juga menjadi penting sebagai media penukaran sampah yang sudah dipilah oleh masyarakat sekaligus sebagai stimulus sirkuler ekonomi. Hal ini membuat proses pemilahan dan pengumpulan sampah yang seharusnya dapat mengurangi sampah rumah tangga tidak terlaksana dengan baik, sebagaimana pernyataan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bali “Minimnya ketersediaan TPS3R dan TPST, terutama di daerah-daerah yang padat, membuat sampah tidak dapat diproses secara optimal sejak dari sumbernya, sehingga mengakibatkan banyak sampah yang langsung dibawa ke tempat pembuangan akhir (TPA) tanpa melalui proses pemilahan dan pengolahan yang memadai”.

Dalam upaya mengatasi permasalahan sampah tersebut, Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan beberapa kebijakan untuk mendorong pengurangan timbulan sampah ataupun mengurangi sampah yang terbuang, seperti:

1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah;

2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 95 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga;
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai;
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber; dan
5. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah.

Regulasi-regulasi tersebut dimaksudkan agar penanganan sampah di Bali dilakukan dengan pendekatan yang lebih komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir, dengan mewajibkan produsen sampah untuk memilah sampah berdasarkan jenisnya, seperti sampah organik (sampah yang mudah terurai), sampah anorganik (sampah yang tidak mudah terurai), dan sampah yang mengandung B3 (bahan berbahaya dan beracun), sehingga sampah yang terpilah dapat dikelola dengan tepat di TPS3R dan/atau TPST, serta mengurangi jumlah residu sampah yang dibuang ke TPA. Selain melalui upaya pemilahan sampah Pemerintah Daerah juga mendorong masyarakat agar mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dalam aktivitas sehari-hari guna mengurangi timbulan sampah plastik, serta melakukan pengelolaan sampah secara komprehensif baik secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan desa adat, desa/kelurahan, ataupun dengan lembaga swasta. Harapannya dengan adanya regulasi tersebut, dapat mendorong pergeseran paradigma lama pengelolaan sampah ke paradigma baru dalam mengelola sampah yang dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir, yaitu dimulai dari mengumpulkan sampah, memilah sampah berdasarkan jenisnya, mengolah sampah yang dapat di daur ulang, mengangkut residu sampah untuk selanjutnya residu sampah di kelola dengan teknologi ramah lingkungan, sehingga permasalahan sampah di Bali dapat terselesaikan.

Di sisi lain, berbagai kebijakan dan upaya pengelolaan sampah yang telah dilakukan masih belum optimal dalam mengatasi permasalahan sampah di Bali. Hal ini disebabkan oleh minimnya sinergi antar pemangku kepentingan, baik di tingkat

pemerintah, masyarakat, maupun swasta. Bahkan sering kali, kebijakan pengelolaan sampah yang diambil oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berjalan secara parsial dan tidak terintegrasi. Sehingga *collaborative governance* dalam mengatasi persoalan sampah di Bali ini menjadi pendekatan yang paling relevan, di mana kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat dioptimalkan untuk menemukan solusi pengelolaan sampah yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Pendekatan *collaborative governance* ini sangat penting mengingat kompleksitas permasalahan sampah di Bali, mulai dari pengelolaan di tingkat rumah tangga hingga penggunaan teknologi ramah lingkungan di tempat pembuangan akhir. Melalui kolaborasi yang erat, pemerintah dapat membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih inklusif, partisipasi, dan terintegrasi, dengan dukungan masyarakat serta sektor swasta sebagai mitra strategis dalam menyelesaikan masalah sampah.

Dalam konteks pengelolaan sampah, kekuatan desa adat yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat merupakan modal sosial dan kultural yang sangat penting. Desa adat di Bali bukan hanya dipahami sebagai institusi sosial tradisional, tetapi juga sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki sistem nilai, norma, kewenangan, dan mekanisme pengaturan sosial yang hidup dalam keseharian masyarakat Bali. Keberadaan desa adat menjadi salah satu karakteristik utama yang membedakan Bali dengan daerah lain, karena desa adat memiliki kedudukan yang kuat dalam membentuk perilaku kolektif masyarakat, menjaga harmoni sosial, serta mengatur kehidupan krama adat melalui *awig-awig*, *pararem*, dan berbagai praktik sosial-budaya yang ditaati secara turun-temurun. Oleh karenanya, Permasalahan sampah tidak cukup diselesaikan hanya melalui pendekatan administratif dan teknokratis oleh pemerintah, tetapi juga memerlukan perubahan perilaku masyarakat sejak dari sumbernya. Pada titik inilah desa adat memiliki peran strategis, karena mampu menggerakkan partisipasi masyarakat melalui pendekatan budaya, pengaplikasian nilai-nilai *Tri Hita Karana* (*Parahyangan*, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, *Pawongan* berarti hubungan antar sesama manusia, dan *Palemahan* hubungan antara manusia dengan

alam lingkungan sekitar), kepatuhan sosial, serta tanggung jawab kolektif terhadap kebersihan lingkungan.

Mendasari berbagai kendala dalam mengatasi permasalahan sampah di Provinsi Bali, penelitian ini menjadi penting karena Bali memiliki kompleksitas sekaligus kekuatan yang khas. Di satu sisi, Bali menghadapi tekanan besar akibat tingginya timbulan sampah, keterbatasan kapasitas TPA, belum meratanya infrastruktur pengolahan sampah, serta dampak langsung terhadap citra pariwisata. Namun di sisi lain, Bali memiliki modal sosial berupa keberadaan desa adat yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat dan berpotensi menjadi penguat utama dalam pengelolaan sampah berbasis sumber. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Provinsi Bali, sekaligus merumuskan strategi kolaboratif yang menempatkan pemerintah daerah, desa adat, masyarakat, sektor swasta, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya sebagai aktor bersama dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu:

1. Tingginya volume sampah harian di Provinsi Bali khususnya pada Kawasan Sarbagita akibat tidak optimalnya pengurangan dan pemilihan sampah di sumber.
2. Kondisi TPA Regional Suwung yang cakupan layanannya meliputi Kota Denpasar dan Kab. Badung telah over kapasitas.
3. Kurangnya ketersediaan infrastruktur, sarana, dan prasarana pengolahan sampah pada tingkat produsen ataupun tingkat komunitas/lingkungan.
4. Munculnya perspektif/pandangan negatif terhadap pariwisata Bali akibat tidak tertanganinya permasalahan sampah di Bali yang berdampak pada menurunnya citra Bali sebagai destinasi wisata dunia.
5. Kebijakan dan upaya pengelolaan sampah di Bali masih berjalan secara parsial (*silo*) dan tidak terintegrasi.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah dan uraian identifikasi masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Provinsi Bali berdasarkan prinsip *Tri Hita Karana*?
2. Apa strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan sampah di Provinsi Bali dalam perspektif *collaborative governance* berdasarkan prinsip *Tri Hita Karana*?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Provinsi Bali berdasarkan prinsip *Tri Hita Karana*.
2. Merumuskan strategi *collaborative governance* yang tepat dalam pengelolaan sampah di Provinsi Bali berdasarkan prinsip *Tri Hita Karana*.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat akademis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi praktik penerapan model *collaborative governance* berdasarkan prinsip *Tri Hita Karana* khususnya dalam konteks mengatasi persoalan sampah, serta bermanfaat bagi pengembangan studi akademis/penelitian dimasa yang akan datang terkait pengelolaan sampah di kawasan perkotaan.
2. Manfaat Praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konkret bagi pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan berbasis kolaborasi dengan mengintegrasikan peran pemerintah, swasta dan masyarakat berdasarkan prinsip *Tri Hita Karana*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah berbasis sumber di Provinsi Bali, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah di Provinsi Bali Berdasarkan Prinsip Nilai *Tri Hita Karana*

Pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di Provinsi Bali dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Permasalahan sampah di Bali merupakan persoalan publik yang kompleks (*wicked problem*) karena tidak hanya terkait dengan meningkatnya timbulan sampah, keterbatasan infrastruktur, dan tekanan terhadap TPA, tetapi juga dipengaruhi oleh perilaku masyarakat, perkembangan pariwisata, kapasitas kelembagaan, ketersediaan sumber daya, serta koordinasi antaraktor. Menurut Ansell dan Gash, faktor-faktor tersebut dapat dianalisis melalui empat dimensi utama, yaitu kondisi awal (*starting conditions*), desain kelembagaan (*institutional design*), kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*), dan proses kolaboratif (*collaborative process*).

Pertama, pada aspek kondisi awal, kolaborasi didorong oleh meningkatnya permasalahan sampah, ketergantungan sumber daya antaraktor, perbedaan kapasitas wilayah, serta keberadaan modal sosial desa adat. Tingginya timbulan sampah dan beban TPA menunjukkan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Pengelolaan sampah membutuhkan keterlibatan masyarakat, desa adat, sektor swasta, komunitas lingkungan, dan akademisi yang saling bergantung dalam sumber daya dan dukungan kebijakan. Sektor pariwisata memiliki peran ganda, yaitu sebagai penyumbang timbulan sampah sekaligus pendorong perbaikan tata kelola lingkungan karena kebersihan menjadi bagian penting dari daya saing Bali sebagai destinasi wisata. Oleh karena itu, sektor ini perlu dilibatkan dalam pengelolaan sampah berbasis sumber dan ekonomi sirkular. Sementara keberadaan

desa adat menjadi faktor khas Bali. Dengan legitimasi sosial dan budaya yang kuat, desa adat mampu menerjemahkan kebijakan pemerintah ke dalam norma lokal melalui *awig-awig*, *perarem*, dan mekanisme sosial lainnya. Karena itu, desa adat menjadi modal sosial penting yang memperkuat kolaborasi dan menjembatani kebijakan dengan tindakan masyarakat.

Kedua, dari aspek desain kelembagaan, Bali telah memiliki dasar regulasi yang cukup kuat melalui kebijakan pembatasan plastik sekali pakai, pengelolaan sampah berbasis sumber, pelibatan desa adat, dan gerakan Bali bersih sampah. Namun, forum koordinasi yang ada masih perlu diperkuat menjadi forum kolaborasi yang lebih permanen, inklusif, dan berbasis rencana aksi bersama. Selain itu, keterlibatan aktor non-pemerintah, sistem data, pelaporan, indikator kinerja, dan akuntabilitas bersama perlu ditingkatkan agar kolaborasi lebih terukur dan berkelanjutan.

Ketiga, pada aspek kepemimpinan fasilitatif, Pemerintah Provinsi Bali berperan sebagai inisiator, regulator, fasilitator, dan koordinator dalam mendorong perubahan paradigma dari pola kumpul-angkut-buang menuju pengelolaan sampah berbasis sumber. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjalankan fungsi pembinaan dan koordinasi teknis, pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab pada implementasi wilayah, sedangkan desa adat berperan sebagai pemimpin sosial di tingkat komunitas. Dalam konteks Bali, kepemimpinan fasilitatif tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga dari desa adat yang memiliki kedekatan dengan masyarakat dan mampu membangun kepatuhan melalui pendekatan budaya. Karena itu, desa adat dapat berfungsi sebagai *collaborative hub*. Meski demikian, masih terdapat tantangan berupa perbedaan kapasitas kepemimpinan lokal, ketergantungan pada aktor tertentu, dan koordinasi lintas sektor yang belum konsisten.

Keempat, dari aspek proses kolaboratif, pengelolaan sampah di Bali telah dilakukan melalui dialog kebijakan, koordinasi, sosialisasi, pembinaan, kampanye pengurangan plastik, penguatan desa adat, pengelolaan TPS3R/TPST, bank sampah, serta berbagai inisiatif komunitas dan sektor swasta. Proses ini

menunjukkan adanya dialog, pembangunan kepercayaan, komitmen bersama, dan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan sampah berbasis sumber. Pemahaman bersama telah berkembang bahwa pengelolaan sampah tidak dapat lagi bergantung pada pola kumpul-angkut-buang. Nilai *Tri Hita Karana*, khususnya aspek *Palemahan*, turut memperkuat kesadaran bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual masyarakat Bali. Namun, proses kolaboratif masih perlu ditingkatkan. Dialog antar aktor masih cenderung konsultatif, sementara partisipasi masyarakat, sektor swasta, dan kelembagaan lokal belum merata. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang lebih terbuka, transparansi data, pembinaan berkelanjutan, pembagian peran yang jelas, monitoring bersama, dan replikasi praktik baik.

Berdasarkan keempat faktor tersebut, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa faktor *Collaborative Governance* yang paling dominan dalam pengelolaan sampah di Provinsi Bali adalah kepemimpinan fasilitatif (*facilitative leadership*). Faktor ini menjadi paling menentukan karena mampu menggerakkan faktor-faktor lainnya, baik kondisi awal, desain kelembagaan, maupun proses kolaboratif. Kepemimpinan fasilitatif terlihat dari peran Pemerintah Provinsi Bali sebagai inisiator, regulator, koordinator, dan fasilitator dalam mendorong perubahan paradigma pengelolaan sampah dari pola kumpul-angkut-buang menuju pengelolaan sampah berbasis sumber.

Dominasi kepemimpinan fasilitatif juga tampak dari kemampuan pemerintah daerah dalam membangun arah kebijakan, menyusun regulasi, mendorong koordinasi lintas sektor, memfasilitasi pelibatan desa adat, serta membuka dukungan sumber daya, termasuk dukungan sarana prasarana dan pemanfaatan lahan untuk pembangunan TPS3R. Tanpa kepemimpinan fasilitatif yang kuat, keberadaan regulasi, forum koordinasi, partisipasi masyarakat, dan keterlibatan aktor non-pemerintah tidak akan berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Namun demikian, dalam konteks Bali, kepemimpinan fasilitatif tidak hanya bertumpu pada pemerintah formal. Faktor ini diperkuat oleh keberadaan desa adat yang memiliki legitimasi sosial, budaya, dan kedekatan

langsung dengan masyarakat. Desa adat berperan sebagai *collaborative hub* yang menerjemahkan kebijakan pemerintah ke dalam norma lokal melalui *awig-awig* dan *perarem*, membangun kepatuhan sosial, serta menggerakkan partisipasi krama dalam pengelolaan sampah berbasis sumber. Oleh karena itu, faktor dominan dalam pelaksanaan *Collaborative Governance* di Bali adalah kepemimpinan fasilitatif yang bersifat ganda, yaitu kepemimpinan formal pemerintah dan kepemimpinan sosial-kultural desa adat.

2. Strategi Penguatan *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah di Provinsi Bali Berdasarkan Prinsip Nilai *Tri Hita Karana*

Strategi *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di Provinsi Bali perlu diarahkan pada penguatan ekosistem kolaborasi secara menyeluruh dengan mengintegrasikan peran pemerintah, desa adat, sektor swasta, komunitas lingkungan, akademisi, dan masyarakat dalam satu sistem kerja yang terarah dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian, strategi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Memperkuat forum kolaborasi lintas sektor yang permanen, inklusif, dan berbasis rencana aksi bersama. Forum ini perlu menjadi ruang koordinasi, penyusunan solusi, pembagian peran, penyelesaian hambatan, dan evaluasi bersama dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- b. Memperkuat desa adat sebagai *collaborative hub* pengelolaan sampah berbasis sumber melalui peningkatan kapasitas *prajuru* adat, penyusunan dan implementasi *perarem*, integrasi isu sampah dalam agenda desa adat, serta pemberian insentif bagi desa yang berhasil.
- c. Memperkuat kapasitas kelembagaan, sarana prasarana, dan sistem operasional pengelolaan sampah berbasis sumber, termasuk pengelola TPS3R/TPST, bank sampah, pengolahan sampah organik, sistem pengangkutan terpilah, dan dukungan pembiayaan berkelanjutan.
- d. Memperkuat kemitraan dengan sektor swasta dan pelaku pariwisata melalui pengurangan sampah dari sumber, pemilahan sampah, dukungan terhadap TPS3R/TPST dan bank sampah, serta pengembangan ekonomi sirkular yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

- e. Memperkuat edukasi, komunikasi publik, dan perubahan perilaku berbasis budaya lokal. Nilai *Tri Hita Karana*, *Sad Kerthi*, gotong royong, dan tanggung jawab krama perlu dijadikan dasar dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah.
- f. Memperkuat sistem data, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas kolaboratif agar pengelolaan sampah dapat diukur secara lebih akurat dan menjadi dasar pengambilan kebijakan yang efektif.
- g. Mereplikasi praktik baik dan mengembangkan model kolaborasi sesuai karakteristik wilayah, mengingat Bali memiliki keragaman kawasan perkotaan, pariwisata, pesisir, desa adat, pasar tradisional, dan perdesaan.

Dengan demikian, strategi *Collaborative Governance* yang paling relevan bagi pengelolaan sampah di Provinsi Bali adalah menjadikan pengelolaan sampah berbasis sumber sebagai agenda bersama seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah berperan sebagai pengarah dan koordinator, desa adat sebagai simpul kolaborasi dan penggerak sosial, sektor swasta sebagai pendukung pembiayaan dan ekonomi sirkular, komunitas lingkungan sebagai pendamping dan edukator, akademisi sebagai penyedia kajian berbasis bukti, serta masyarakat sebagai pelaku utama pengurangan dan pemilahan sampah dari sumber.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di Provinsi Bali pada dasarnya telah memiliki fondasi yang relatif kuat. Hal tersebut ditunjukkan oleh adanya dukungan regulasi, kepemimpinan Pemerintah Provinsi Bali sebagai inisiator dan fasilitator, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, serta keberadaan desa adat sebagai modal sosial dan *collaborative hub* dalam mendorong pengelolaan sampah berbasis sumber. Namun demikian, efektivitas kolaborasi tersebut masih perlu diperkuat karena pengelolaan sampah di Bali merupakan persoalan publik yang kompleks (*wicked problem*) dan tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor secara sendiri-sendiri. Penelitian ini menemukan bahwa tantangan utama masih berkaitan dengan belum optimalnya koordinasi lintas sektor, belum meratanya kapasitas kelembagaan dan

sarana prasarana antarwilayah, belum konsistennya partisipasi masyarakat dan sektor swasta, serta belum kuatnya sistem data, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas kolaboratif. Oleh karena itu, saran dalam penelitian ini diarahkan untuk memperkuat ekosistem kolaborasi secara menyeluruh, baik pada aspek kelembagaan, kepemimpinan, kapasitas implementasi, perubahan perilaku masyarakat, kemitraan multipihak, maupun pengembangan kajian ilmiah selanjutnya.

1. Saran Praktis

a. Kepada Pemerintah Provinsi Bali

Pemerintah Provinsi Bali perlu memperkuat tata kelola kolaboratif pengelolaan sampah melalui forum kolaborasi lintas sektor yang permanen, inklusif, dan memiliki mandat, pembagian peran, indikator kinerja, serta mekanisme evaluasi yang jelas, sekaligus meningkatkan fungsi koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pemerintah kabupaten/kota, desa/kelurahan, desa adat, dan pelaku usaha dalam aspek teknis, kelembagaan, pembiayaan, serta perubahan perilaku masyarakat. Selain itu, diperlukan pengembangan sistem data terpadu pengelolaan sampah yang memuat berbagai informasi penting terkait timbulan, pengolahan, dan kinerja pengelolaan sampah agar kebijakan yang diambil lebih berbasis bukti dan dapat dievaluasi secara berkala.

b. Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Pemerintah kabupaten/kota perlu memperkuat implementasi pengelolaan sampah berbasis sumber sesuai kondisi wilayah masing-masing dengan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, seperti TPS3R, TPST, bank sampah, fasilitas pengolahan organik, serta sistem pengangkutan sampah terpilah. Selain itu, pemerintah daerah perlu memperkuat kelembagaan pengelola sampah di tingkat desa/kelurahan dan membangun koordinasi yang lebih erat antara desa dinas dan desa adat agar kebijakan administratif dapat berjalan selaras dengan norma sosial dan budaya masyarakat. Upaya tersebut juga harus didukung

oleh alokasi pembiayaan yang memadai dan berkelanjutan, karena pengelolaan sampah memerlukan dukungan anggaran, sumber daya manusia, kelembagaan, serta pemeliharaan fasilitas secara konsisten dan tidak dapat bergantung pada program yang bersifat sesaat.

c. Kepada Desa Adat

Desa adat perlu diperkuat sebagai *collaborative hub* dalam pengelolaan sampah berbasis sumber melalui penyusunan atau penguatan perarem yang mengatur kewajiban pemilahan sampah, pengurangan plastik sekali pakai, pengelolaan sampah organik, jadwal pengangkutan terpilah, sanksi sosial, dan insentif bagi krama yang patuh sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Bersama desa/kelurahan, desa adat juga perlu mengintegrasikan pengelolaan sampah ke dalam agenda rutin masyarakat, seperti *paruman*, kegiatan banjar, gotong royong, kegiatan keagamaan, dan edukasi lingkungan, sehingga pengelolaan sampah dipahami tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai tanggung jawab menjaga kesucian, kebersihan, dan keharmonisan lingkungan sesuai nilai Tri Hita Karana. Selain itu, desa adat dan desa/kelurahan perlu memperkuat kerja sama dengan komunitas lingkungan, pengelola TPS3R/TPST, bank sampah, pelaku usaha, dan sekolah agar pengelolaan sampah berbasis sumber dapat berjalan lebih konsisten dan berkelanjutan.

d. Kepada Sektor Swasta dan Pelaku Pariwisata

Sektor swasta, khususnya pelaku pariwisata, hotel, restoran, pusat perdagangan, dan sektor jasa, perlu meningkatkan tanggung jawab dalam pengurangan sampah melalui pemilahan dari sumber, pengurangan plastik sekali pakai, pengelolaan sampah organik, serta kerja sama dengan TPS3R/TPST, bank sampah, komunitas lingkungan, dan desa adat. Keterlibatan sektor swasta juga perlu diwujudkan dalam kemitraan jangka panjang, tidak hanya melalui CSR yang bersifat sementara, dengan berkontribusi pada penyediaan teknologi pengolahan sampah, dukungan pembiayaan, pengembangan ekonomi sirkular, inovasi produk ramah

lingkungan, dan penguatan rantai nilai daur ulang. Selain itu, pelaku pariwisata perlu menjadikan pengelolaan sampah sebagai bagian dari standar pariwisata berkelanjutan guna menjaga kualitas lingkungan sekaligus memperkuat citra dan daya saing Bali sebagai destinasi wisata dunia.

e. Kepada Komunitas Lingkungan, NGO, Akademisi, dan Media

Komunitas lingkungan dan NGO perlu terus memperkuat edukasi, pendampingan, kampanye perubahan perilaku, serta pengembangan praktik baik pengelolaan sampah berbasis sumber secara berkelanjutan agar pemilahan sampah menjadi kebiasaan sosial. Akademisi perlu meningkatkan kontribusi melalui penelitian, evaluasi kebijakan, inovasi teknologi tepat guna, pengukuran efektivitas program, dan penyusunan rekomendasi berbasis bukti yang terhubung dengan kebutuhan kebijakan sehingga dapat diadopsi oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Sementara itu, media perlu memperluas komunikasi publik, mempublikasikan praktik baik, mengawasi implementasi kebijakan, dan membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah berbasis sumber.

f. Kepada Masyarakat

Masyarakat sebagai penghasil sampah perlu menjadi aktor utama dalam pengelolaan sampah berbasis sumber. Partisipasi masyarakat tidak cukup hanya diwujudkan melalui kepatuhan membuang sampah pada tempatnya, tetapi juga melalui pengurangan timbunan sampah, pemilahan sampah organik dan anorganik, pemanfaatan bank sampah, pengolahan sampah organik, serta dukungan terhadap aturan desa adat dan kebijakan pemerintah. Perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan pengelolaan sampah di Bali. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama untuk menjaga kesehatan, kebersihan, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan Bali.

2. Saran Akademis

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian yang lebih mendalam mengenai efektivitas peran desa adat sebagai *collaborative hub* dalam pengelolaan sampah berbasis sumber melalui studi komparatif antara desa adat yang berhasil dan belum berhasil menerapkan pengelolaan sampah guna mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan implementasi di tingkat lokal. Selain itu, penelitian dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran untuk mengukur dampak kolaborasi terhadap penurunan timbulan sampah, peningkatan pemilahan dari sumber, pengurangan residu ke TPA, peningkatan partisipasi masyarakat, serta efektivitas TPS3R/TPST, sehingga tidak hanya menggambarkan proses kolaborasi secara kualitatif tetapi juga menghasilkan ukuran dampak yang lebih objektif. Penelitian lanjutan juga perlu mengkaji keterlibatan sektor pariwisata dan sektor swasta dalam pengembangan ekonomi sirkular mengingat kedua sektor tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan, inovasi, dan praktik pengelolaan sampah berkelanjutan.

C. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Teoretis

Penelitian ini memperkaya penerapan model *Collaborative Governance* Ansell dan Gash dalam konteks pengelolaan sampah berbasis sumber di daerah yang memiliki kekhasan sosial budaya. Penelitian ini menunjukkan bahwa empat dimensi utama dalam model Ansell dan Gash, yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif, dapat digunakan untuk menjelaskan dinamika kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Bali. Kontribusi teoritis utamanya terletak pada penegasan bahwa desa adat dapat diposisikan sebagai faktor khas dalam pelaksanaan *Collaborative Governance*, tidak hanya sebagai aktor kolaborasi tetapi juga sebagai *collaborative hub* yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan tindakan kolektif masyarakat, sehingga memperluas pemahaman mengenai *Collaborative Governance* melalui dimensi modal sosial budaya lokal sebagai penguat proses kolaboratif.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi tidak hanya dipengaruhi oleh kapasitas formal pemerintah, tetapi juga oleh legitimasi sosial, norma lokal, kepemimpinan komunitas, dan nilai budaya; dalam konteks Bali, nilai *Tri Hita Karana* dan kelembagaan desa adat menjadi unsur penting yang memperkuat kepercayaan, kepatuhan sosial, pemahaman bersama, dan komitmen masyarakat terhadap pengelolaan sampah berbasis sumber.

2. Kontribusi Praktis

penelitian ini memberikan rumusan strategi penguatan *Collaborative Governance* yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan dalam memperbaiki tata kelola sampah di Provinsi Bali, meliputi penguatan forum kolaborasi lintas sektor, desa adat sebagai *collaborative hub*, kapasitas kelembagaan dan sarana prasarana, kemitraan sektor swasta dan ekonomi sirkular, edukasi dan komunikasi publik, sistem data dan monitoring, serta replikasi praktik baik berbasis wilayah. Strategi tersebut dapat menjadi pedoman bagi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, desa adat, komunitas lingkungan, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dalam memperkuat pengelolaan sampah berbasis sumber, sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah sangat bergantung pada kemampuan para aktor untuk bekerja sama, berbagi peran, membangun kepercayaan, dan menjaga komitmen secara berkelanjutan.

3. Kontribusi Kebijakan

Penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam pengembangan model tata kelola kolaboratif berbasis kearifan lokal. Model yang dirumuskan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah di Bali tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi dan kapasitas pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan mengintegrasikan pemerintahan formal dengan kelembagaan adat, nilai budaya, dan partisipasi masyarakat.

Dengan menempatkan desa adat sebagai *collaborative hub*, penelitian ini menawarkan pendekatan tata kelola yang kontekstual bagi daerah yang

memiliki kelembagaan sosial budaya kuat. Model ini tidak hanya relevan untuk pengelolaan sampah di Bali, tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan tata kelola kolaboratif pada isu-isu pembangunan berkelanjutan lainnya yang membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, komunitas, akademisi, dan kelembagaan lokal.



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Rifa'i. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Ade, Shira. Penanganan Sampah di Denpasar Masih Jauh dari Harapan, Begini Ultimatum Pj. Gubernur Kepada Pengelola TPST. <https://indobalinews.pikiran-rakyat.com/bali-nusra/pr-887319759/penanganan-sampah-di-denpasar-masih-jauh-dari-harapan-begini-ultimatum-pj-gubernur-kepada-pengelola-tpst?page=all>, diakses pada 20 Agustus 2024.
- Anggara, Sahya dan Sumantri, Ii. 2016. *Administrasi Pembangunan Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Anwar, Muhadjir. 2020. *Manajemen Strategik Daya Saing dan Globalisasi*. Banyumas: Sasanti Institute.
- Astuti, Retno Sunu., dkk. 2020. *Collaborative governance Dalam Prespektif Administrasi Publik*. Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik Press.
- Avitadira, Kanaya dan Indrawati, Novie. 2023. "Upaya Mengatasi Permasalahan Sampah di DKI Jakarta Tahun 2021: Tinjauan *Collaborative governance*". *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 5, (1). 49-69.
- Berlia, G. W. & Puspaningtyas, A. 2023. "Strategi Pengelolaan Sampah Melalui *Collaborative governance* di TPSt Desa Bambe Kabupaten Gresik". *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*. 1, (4). 345-355. DOI: <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i4.720>.
- Budiman, Arif. 2022. Pesona Wisata Bali Tercoreng Masalah Sampah <https://www.voaindonesia.com/pesona-wisata-bali-tercoreng-masalah-sampah/6606474.html>, 07/06/2022, diakses pada 07 Oktober 2022
- Badan Pusat Statistik, Provinsi Bali Dalam Angka 2026. [Provinsi Bali Dalam Angka 2026 - Badan Pusat Statistik Provinsi Bali](#)
- Chotimah, Chusnul. *Pegelolaan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kawasan Destinasi Wisata Pesisir Pantai Selatan Tulungagung*. Tulungagung: Akademia Pustaka.
- Chotimah, H, C, dkk. "Model *Collaborative governance* Dalam Pengelolaan Sampah Plastik Laut Guna Mewujudkan Ketahanan Lingkungan Maritim di

- Kepulauan Seribu”. *Jurnal Ketahanan Nasional*. 2, (3). 348-376. DOI: <https://doi.org/10.22146/jkn.69661>.
- Data Sumber Sampah, <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/sumber>, diakses pada 25 Maret 2025.
- Data Timbulan Sampah, <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>, diakses pada 13 September 2024.
- Defitri, Mita. 2023. Pengertian Sampah & Jenis-Jenisnya. Online (<https://waste4change.com/blog/sampah-pengertian-jenis-hingga-peraturannya-di-indonesia/>). Di akses 25 September 2024.
- Dzulfikar, Aufa Bima., dkk. 2019. “Kajian Alur dan Proses Pengelolaan Sampah Daerah Istimewa Yogyakarta”. *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana Departemen Teknik Sipil FT-UI*. 355-362.
- Firdaus, Mohamad. 2023. “Empat Elemen Governance Dalam Pengelolaan Sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta”. *The Journalish: Social and Government*. 471-481. DOI: <https://doi.org/10.55314/tsg.v4i4.689>.
- Firdausi, Eyda. 2024. “Implementasi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan: Studi Kasus Bank Sampah Di Kelurahan Kotabaru, Kota Yogyakarta”. *Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains*. 5, (1). 60-65. DOI: <https://doi.org/10.55448/jp07jg04>.
- Firmansyah, Andi. 2023. “Strategi Kebijakan Penanganan Pengelolaan Sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta: Program Studi Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan, Sekolah Pascasarjan Universitas Gajah Mada.
- Hasan, Samsurijal., dkk. 2021. *Manajemen Strategi*. Banyumas: CV. Pena Persada.
- Karden, Manik. 2009. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Djambatan.
- Mahyudin, R, P. 2014. “Strategi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan”. *EnviroScientee*. 10, (1). 33-44. DOI: <http://dx.doi.org/10.20527/es.v10i1.1962>.
- Martomo, Yitno Puguh. 2017. *Collaborative governance Sebagai Basis Pengelolaan Public Affairs*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Nazarudin. 2020. *Manajemen Strategik*. Palembang: CV. Amanah.
- Noor, Muhammad., dkk. 2022. *Collaborative governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*. Yogyakarta: Bildung.

- Pambudi, Yonathan Suryo. 2023. *Mecapai Pengelolaan Sampah Perkotaan Berkelanjutan: Panduan Lengkap*. Indramayu: CV. Adanu Abimata.
- Purnomo, Chandra Wahyu. 2021. *Solusi Pengelolaan Sampah Kota*. Sleman: Gajah Mada Univesuty Press.
- Putri, Sanusi Riani. Luhut Beberkan Model Investasi Tempat Pengolahan Sampah di Bali, Nilainya Capai Rp 228.633 Miliar. <https://bisnis.tempo.co/read/1702256/luhut-beberkan-model-investasi-tempat-pengolahan-sampah-di-bali-nilainya-capai-rp-228-633-miliar>, diakses pada 13 September 2024.
- Putri, T, V, dkk. (2023). “Strategi Pengelolaan Sampah Menggunakan Analisis SWOT: Studi Kasus TPA Regional Payakumbuh”. *Jurnal Serambi Engineering*. 3. 6697-6706.
- Qomariyah, Erni. 2023. *Collaborative governance*. Malang: Selaras Media Kreasindo.
- Runtunuwu, Prince Charles Heston. 2020. *Kajian Sistem Pengolahan Sampah*. Malang: Ahlimedia Press.
- Sahir, Syafrida Hafni. 2021. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia.
- Samudro, Rizky Setyo. Pemprov Bali Tambah TPST-TPS3R Antisipasi Penutupan TPA Suwung. <https://www.detik.com/bali/berita/d-6865061/pemprov-bali-tambah-tpst-tps3r-antisipasi-penutupan-tpa-suwung>, diakses pada 13 September 2024.
- Siagian, Sondang P. 2016. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekmana, Soma. 2010. *Pengantar Ilmu Teknik Lingkungan*, (Seri : Pengelolaan Sampah Perkotaan). Bogor: IPB Pers.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-19.
- Suyasa, I Wayan Budi. 2023. *Landasan dan Strategi Pengelolaan Sampah Perkotaan*. Yogyakarta: Nas Media Pustaka.
- Syafari, M Riduansyah. 2023. *Administrasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Banjarmasin: Center dor Election and Political Party (CEPP) ULM.
- Wardoyo, Paulus. dan Widjajanti, Kesi. 2013. *Manajemen Strategik, Konsep & Aplikasi*. Semarang: Semarang University Press.